

**ANALISIS KETERKAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2000 – 2010**

*ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH, INCOME
INEQUALITY AND POVERTY REDUCTION IN NORTH SULAWESI PROVINCE
YEAR 2000 – 2010*

Anton Tri Wijayanto

*Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pascasarjana Unsrat
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : antontw@bps.go.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, mengetahui tingkatan pengaruh pertumbuhan ekonomi apakah *pro poor* atau *anti poor* serta mengetahui sektor-sektor yang memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Analisa dilakukan melalui data panel lima belas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2000-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan dilihat dari nilai elastisitas neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan tetapi ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2000-2010 bersifat *pro kemiskinan (pro poor)* yang ditandai dengan angka indeks *pro-poor growth* sebesar 0,66. Sedangkan sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor bangunan dan konstruksi serta sektor angkutan dan komunikasi.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan

ABSTRAK

The study aims to analyze the influence of economic growth and income disparity on poverty eradication in Sulawesi Utara, to find out the level of economic growth influence whether it is pro-poor or anti-poor and to find out the sectors influencing the poverty eradication. The panel data from 2000 to 2010 of 15 districts in Sulawesi Utara province were analyzed. The result showed that the economic growth and income disparity in Sulawesi Utara area had negative influence on poverty level. Based on the elasticity value of net poverty on the economic growth, the economic growth can minimize the poverty but income disparity became a constraint or minimized the effectiveness of economic growth in poverty eradication. The economic growth in Sulawesi Utara for 2000-2010 was pro-poor that marked with the index value of pro-poor growth of 0.66. The sectors dominantly influencing poverty eradication were building and construction and transportation and communication.

Keywords : economic growth, income inequality and poverty

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Para ahli mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap hal ini (Lin, 2003; Bourguignon, 2004; Ravallion, 2005; dan Warr, 2000, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (Produk Domestik Bruto-PDB). Diharapkan dengan PDB yang tinggi maka akan tercipta *trickle down effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Isu tentang pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan telah lama menjadi fokus utama pembangunan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Analisa hubungan segitiga antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. *Pertama*, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pembagian distribusi pendapatan. *Kedua*, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, adanya permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan memberikan dampak instabilitas sosial, ketidakpastian, dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Bila keadaan tersebut terus berlanjut pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan kelangsungan pemerintahan yang ada. Menurut Arsyad (1999) dalam Hajiji (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*Trickle Down Effects*" atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.
2. Menganalisis sektor-sektor PDRB yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pengentasan kemiskinan.
3. Menganalisis tingkat pro poor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Nafziger (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi suatu negara atau pendapatan per kapita. Produksi tersebut dihitung dengan GNP (*Gross National Product* – Produk Nasional Bruto) atau GNI (*Gross National Income* – Pendapatan Nasional

Bruto) yang merupakan total output dari negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi berarti juga peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Konsep PDB digunakan pada tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota digunakan konsep PDRB. PDB atau PDRB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran (Tambunan, 2003). Pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat (*Aggregate Supply - AS*) sedangkan pendekatan pengeluaran adalah pendekatan dari sisi permintaan agregat (*Aggregate Demand - AD*).

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Alesina dan Rodrik (1994) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

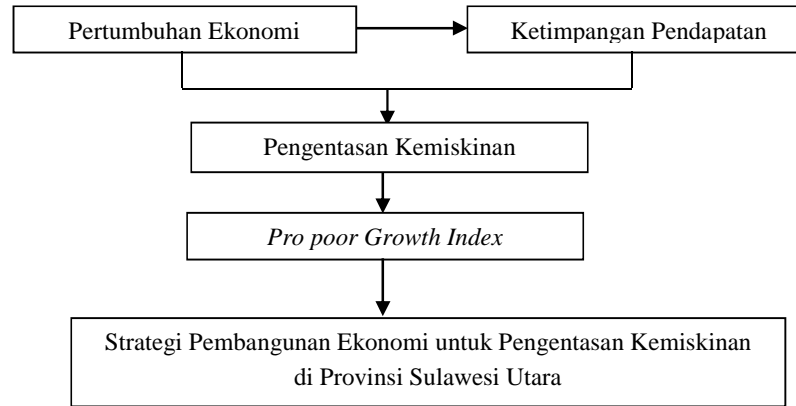
Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasinya, sebagaimana digambarkan oleh World bank (2000) dalam Harniati (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: "*Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how to read. Poverty is not having a job, poverty is fear for the future, living one day at a time. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom*". Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan (BPS, 2007).

Pro Poor Growth Index (PPGI)

Kakwani dan Pernia (2000) menyatakan bahwa konsep *pro poor growth* pertama kali diperkenalkan pada era 1950 an dan kemudian dipertegas oleh Chenery (1974). Konsep *pro poor growth* juga secara implisit dijelaskan dalam World Development Report 1990 (World Bank, 1990). *Pro poor growth index* adalah suatu ukuran untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi bisa disebut *pro poor*. Indeks ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Data yang diperlukan tidak terlalu sulit, sehingga mudah dihitung.
2. Indeks ini dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pro poor pada tingkat makro dan mikro.
3. Indeks ini bisa dihitung menurut sektor ekonomi ataupun wilayah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Tinjauan pustaka, 2016

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan tetapi juga akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.
2. Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi (sektor PDRB) tertentu akan berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Pro Poor.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu 2000 – 2010, menganalisis tentang keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Definisi Operasional Variabel

Dalam upaya mempermudah pelaksanaan penelitian, terlebih dahulu didefinisikan indikator operasional yang terkandung dalam obyek penelitian sehingga variabel yang akan dianalisis dapat dibedakan sebagai berikut :

1. **Produk domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh kabupaten/kota yang ada didalamnya. PDRB disimbolkan dengan Y_{it} dalam miliar rupiah.
2. **Pertumbuhan Ekonomi**, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara diukur melalui laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh kabupaten/kota yang ada didalamnya. Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran dari pertumbuhan total PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, yaitu perbandingan antara nilai PDRB pada satu tahun dengan tahun sebelumnya, dalam persen.

3. **Pendapatan Perkapita.** Angka pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Di daerah baik di level pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi pendapatan daerah tersebut dengan jumlah penduduknya.
4. **Kemiskinan.** Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota yang ada didalamnya diukur melalui jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dilambangkan dengan P_{it} dalam satuan jiwa.

Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan antara lain PDRB Provinsi Sulawesi Utara, PDRB kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), indeks *Gini*, dan angka kemiskinan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didapat dari Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Periode yang diteliti mulai tahun 2000 sampai dengan 2010.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, kemiskinan, tenaga kerja dan jumlah penduduk.

Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan terdahulu yaitu untuk menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai alat pengolahan data menggunakan software Eviews 6 yang menghasilkan output analisis deskriptif dan beberapa pengujian asumsi, Microsoft excel 2010 untuk input data dan perhitungan variabel, Stata 11 untuk penghitungan indeks gini.

Model Analisis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pendapatan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\log G_{it} = \gamma_i + \beta_i \log Y_{it} + v_{it}$$

dimana :

- G : indeks Gini (nilainya antara 0 dan 1)
- Y : PDRB konstan (dalam satuan Rp juta)
- : *intercept (fixed/random effect* untuk kabupaten i)
- : *error term*
- i : kabupaten 1,2,3,..., 11
- t : 2000 sampai dengan 2010

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\log P_{it} = \delta_i + \alpha_i \log Y_{it} + \beta \log G_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana :

- P : jumlah penduduk miskin (dalam satuan jiwa)
- Y : PDRB konstan (dalam satuan Rp juta)
- G : indeks Gini (nilainya antara 0 dan 1)

: *intercept (fixed/random effect* untuk kabupaten i)

: *error term*

i : kabupaten 1,2,3,..., 11

t : 2000 sampai dengan 2010

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\beta = \alpha + (\sigma \times u)$$

Parameter β melambangkan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika distribusi pendapatan tidak berubah. Parameter σ melambangkan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian dapat di hitung parameter β , yaitu elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (*nett elasticity of poverty to growth*).

4. *Pro Poor Growth Index*. Ukuran kemiskinan adalah ukuran yang ditentukan oleh garis kemiskinan, pendapatan rata-rata dan kurva Lorenz yang menyatakan ketimpangan pendapatan (Kakwani dan Pernia, 2000), sehingga:

$$P = P(z, \mu, L(p))$$

dimana:

P : ukuran kemiskinan (persentase jumlah orang miskin dalam satuan persen)

z : garis kemiskinan (dalam satuan Rp per tahun)

μ : pendapatan rata-rata masyarakat (dalam satuan Rp per tahun)

$L(p)$: kurva Lorenz, menunjukkan persentase pangsa pendapatan yang dinikmati oleh kelompok p persen terbawah dari populasi (nilai p antara 0 sampai 1)

5. Analisis Pengentasan Kemiskinan. Untuk menguji efek pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan dalam kemiskinan berdasarkan persamaan (19), persamaan yang akan diestimasi adalah:

$$\log P_{it} = a + b_j \log Y_{jit} + c \log N_{it} + v_{it}$$

dimana :

P : jumlah penduduk miskin (dalam satuan jiwa)

Y_j : PDRB sektor ke- j (dalam satuan Rupiah)

j : 1,2,3,... 9 (sektor ke- j)

i : 1,2,3,... 11 (kabupaten ke- i)

: *error term*

t : 2000 sampai dengan 2010

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2001-2010 cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat sedikit melambat di tahun 2003. Tahun 2001 ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 2,13 persen, meningkat di tahun 2002 menjadi 3,32 persen kemudian sedikit melambat menjadi 3,20 persen di tahun 2003. Tahun 2004 dan 2005 pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 4 sampai 5 persen, namun pada tahun 2006 hingga tahun 2008 pertumbuhan ekonomi meningkat pesat hingga mencapai 7,56 persen di tahun 2008 dan 7,85 di tahun 2009. Pertumbuhan tertinggi untuk tahun 2010 terjadi pada sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa – jasa dengan nilai pertumbuhan diatas 1 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dibawah 1 persen. Namun hanya sektor listrik, gas dan air bersih yang tumbuh dibawah 0,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi penopang perekonomian Provinsi Sulawesi Utara masih seimbang antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Ketiga sektor tersebut masing – masing mempunyai peran yang proporsional dalam menopang perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Selama periode tahun 2000 – 2010, garis kemiskinan

naik sebesar 9,86 persen per tahun, yaitu dari Rp. 114.220,- per kapita per bulan pada tahun 2000 menjadi Rp. 226.904,- per kapita per bulan pada tahun 2010. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2000–2010 di Sulawesi Utara berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan dari periode 2001–2003, peningkatan dari periode tahun 2003–2006 dan kembali terjadi penurunan dari periode tahun 2006–2010. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebesar 220,8 ribu (9,59 persen). Secara umum terjadi penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2009 yang berjumlah 218,2 ribu (9,80 persen), berarti jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,4 ribu orang. Bila dilihat menurut daerah kondisi tahun 2010 maka persentase penduduk miskin terbesar ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 18,81 persen.

Sementara itu, persentase penduduk miskin terkecil ada di ibukota Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,51 persen. Namun bila dilihat dari angka absolut, jumlah penduduk miskin paling banyak ada di kabupaten Minahasa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27.904 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit ada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.531 jiwa. Data indeks Gini tahun 2000–2010 menunjukkan bahwa secara umum di Provinsi Sulawesi Utara terjadi kenaikan dari sekitar 0,098 menjadi 0,318. Kenaikan ini menunjukkan terjadinya kenaikan ketimpangan antar individu. Kenaikan ketimpangan juga terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, ini berarti pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada periode 2000–2010 juga membawa dampak berupa kenaikan ketimpangan pendapatan antar individu. Perubahan distribusi terjadi pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Umumnya, pada periode 2000–2010 ketimpangan pendapatan semakin bertambah, kecuali pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang angka gini rasionya baru dihitung mulai tahun 2010. Perubahan distribusi pendapatan yang terbesar terjadi pada Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai yang didapat sebesar 1,154. Artinya peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 1,154 persen (Tabel 1). Peningkatan ketimpangan pendapatan ini karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk. Hasil ini sejalan dengan yang didapat oleh Lin (2003) dan hasil penelitian Hidayat dan Patunru (2007). Mereka juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Tabel 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

R ²	F-statistik	
0,334254	4,987272 ***	1,154690 (2.379125) ***

Ket: Angka di dalam kurung adalah t-statistik, *** Signifikan pada taraf nyata 1 %

Sumber: Pengolahan data, 2016

Perubahan distribusi pendapatan bisa juga dilihat dari perubahan pada kurva distribusi pengeluaran per kapita. Pada tahun 2000, distribusi pengeluaran per kapita relatif merata, ditandai dengan bentuk kurva yang ramping dengan indeks Gini sebesar 0,098. Pengeluaran per kapita relatif rendah, dengan nilai rata-rata Rp 172.108 per bulan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2000-2010 memperlebar dan menggeser kurva ke kanan. Pelebaran kurva pengeluaran

ini berarti distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan pergeseran ke kanan berarti peningkatan pada pendapatan per kapita. Pada periode 2000-2010, pelebaran dan pergeseran kurva distribusi pengeluaran terus terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Provinsi Sulawesi Utara. Akhirnya, pada tahun 2010 kurva distribusi pengeluaran per kapita menjadi semakin lebar dan bergeser ke kanan. Data Susenas menunjukkan bahwa indeks Gini pada tahun 2010 sebesar 0,318, yang berarti peningkatan sebesar 0,22 poin. Sedangkan rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp 506.633 per bulan, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2000.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan nilai elastisitas -0,2558. Pertumbuhan ini akan meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan per kapita yang meningkat berarti penduduk miskin akan berkurang. Hal yang sebaliknya terjadi pada ketimpangan pendapatan. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berhubungan positif dengan kemiskinan dengan nilai elastisitas 0,071, namun tidak signifikan secara statistik.

Tabel 2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan

Adjusted R ²	F-statistik	Pertumbuhan Ekonomi ()	Ketimpangan Pendapatan ()
0,856927	62,39163 ***	-0,255899 (-4.696809) ***	0,071733 (0.600244) *

Ket: Angka didalam kurung adalah t-statistik, *** Signifikan pada taraf nyata 5 %

* Tidak Signifikan

Sumber: Pengolahan data, 2016

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan data pada Tabel 3, nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi () sebesar -0,1730. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,1730 persen. Hasil ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Bidani dan Ravallion (1993), Lin (2003), Bourguignon (2004), Ravallion (2006), dan Warr (2000, 2006).

Tabel 3. Dekomposisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Netto terhadap Kemiskinan

Efek Pertumbuhan Ekonomi ()	Efek Ketimpangan Pendapatan (x)	Elastisitas Netto Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ()
-0,255899	0,082829	-0,173069

Sumber: Pengolahan data, 2016

Kemiskinan seharusnya turun sebesar 0,255 persen jika ada pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, namun karena adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, maka kemiskinan hanya turun sebesar 0,173 persen saja. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada distribusi pendapatan atau dapat juga dengan meningkatkan tingkat pendapatan (Bourguignon, 2004; Warr, 2006). Namun kondisi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan ketimpangan. Sehingga keefektifan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan akan berkurang.

Pro Poor Growth Index

Hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa bernilai -0,173069 sedangkan bernilai -0,2558 sehingga:

$$w = \frac{-0,173069}{-0,2558} = 0,664$$

Berdasarkan kriteria Kakwani dan Pernia (2000), hasil w sebesar 0,664 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara telah *pro poor* (*pro poor growth*). Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi yang dicapai membawa dampak pada peningkatan pendapatan, tapi secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tersebut mampu mengurangi kemiskinan

Analisis Pengentasan Kemiskinan

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Dari 10 variabel hanya tiga variabel yang tidak signifikan yaitu sektor pertanian yang berkoefisien positif terhadap kemiskinan, sektor pertambangan yang berkoefisien positif terhadap kemiskinan dan sektor jasa – jasa yang berkoefisien positif juga terhadap kemiskinan. Sedangkan ketujuh variabel lainnya signifikan. Diantara ketujuh variabel yang signifikan, hanya 2 variabel yang berkoefisien negatif yaitu: sektor bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi. Karena model yang digunakan adalah model *double log* maka hasil regresi tersebut dimaknai dengan elastisitas. Koefisien sektor bangunan konstruksi sebesar 0,97, berarti peningkatan sektor konstruksi sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,97 %, sedangkan peningkatan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 1% akan menyebabkan pengurangan kemiskinan sebesar 2,6%. Penurunan kemiskinan ini bisa melalui ketimpangan yang menurun maupun peningkatan pendapatan. Nilai *R-squared* (R^2) atau koefisien determinasi model *Fixed Effect* sebesar 0.91 yang menunjukkan bahwa 91% keragaman perubahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode 2000-2010, Pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, dari 13,03 persen pada tahun 2000 menjadi 9,10 persen pada tahun 2010. Namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara ternyata juga meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan indeks Gini, meningkat dari sekitar 0,098 pada tahun 2000 menjadi 0,318 pada tahun 2010. Peningkatan ketimpangan pendapatan ini menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.
2. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2000-2010 telah bersifat pro kepada kemiskinan (*pro-poor growth*) yang di tandai dengan angka indeks *pro-poor growth* sebesar 0,66.
3. Sektor-sektor yang berpengaruh dominan dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor bangunan dan konstruksi serta sektor angkutan dan komunikasi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka disarankan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya *trade-off* antara kenaikan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, sehingga perlu dipertimbangkan strategi yang lebih baik agar pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan ketimpangan.
2. Strategi pembangunan yang dilakukan sebaiknya dengan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian, yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga pertumbuhannya bisa mengurangi kemiskinan.
3. Strategi pembangunan yang dilakukan perlu dibuat menjadi lebih *pro-poor* lagi dengan cara memberi akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, sehingga penduduk miskin bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya.
4. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penentu dalam pengentasan kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu tanpa mengesampingkan upaya-upaya perbaikan distribusi pendapatan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dan *up to date* dengan variabel-variabel yang lebih rinci, sehingga hasilnya akan lebih baik.
2. Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, tapi tidak diuji pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis keterkaitan ini karena ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Seran, Sirilius. 2012. Determinan Faktor Sosial dan ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk [Jurnal]. Timor : Universitas Timor.
- [2] Andri Alfarabi. 2014. Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya Terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014. 171-178.
- [3] Anoma Abayaratne. 2013. Economic Growth and Poverty Reduction : Lesson from the Malaysian Experience.
- [4] Paolo verme. 2006. ProPoor Growth During Exceptional Growth. Evidence From a Transition Economy. The European Journal of Comparative Economics Vol 3 n.1. 3-14.

Buku

- [5] Abdelhak, Senadjki. 2012. Social Protection and Poverty Reduction in Four Selected Southeast Asian Countries: An Analysis of the Healthcare Sector towards Pro-Poor Growth. Malaysia : Universiti Sains Malaysia.
- [6] Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Kemiskinan Multidimensi. Jakarta : Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- [7] Baltagi BH. 2011. *Econometric Analysis of Panel Data 5th edition*. West Sussex: John Wiley and Sons.
- [8] Geoff Handley, Kate Higgins, Bavna. 2009. Poverty and Poverty Reduction : An Overview of Key Issues. London : Overseas Development Institute.
- [9] Gujarati DN. 2004. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw Hill.

- [10] Hull, Katy. 2009. *Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment and Poverty Reduction*. US : OECD.
- [11] Kakwani N, Prakash B, Son HH. 2000. Growth, inequality and poverty: an introduction. *Asian Development Review* 18:2, 1-21.
- [12] Kakwani N, Khandker S, Son HH. 2004. Pro-poor growth: concepts and measurement with country case study. *United Nations Development Programme International Poverty Centre Vol 1*. Brazil.
- [13] Mirza, Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- [14] Ravallion M. 2006. Why has economic growth been more pro poor in some states. *Journal of Development Economic*. Washington DC : World Bank.
- [15] Tambunan TH. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [16] Todaro MP, Smith SC. 2015. *Economic Development* (Alih Bahasa oleh Haris Munandar dan Puji A.L.). Jakarta: Erlangga.
- [17] Yunus M. 2007. *Creating A World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: Public Affair.